

Determinan Sosial Ekonomi Terhadap Kejahatan Kerah Putih

Yusuf Adiandaru, Sitti Retno Faridatussalam

Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta
adiandaruyusuf@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the influence of socio-economic factors on white-collar crime in Indonesia, data taken from 34 provinces during 2017–2023. Using quantitative data taken from the Central Bureau of Statistics of Indonesia. This study uses quantitative analysis through panel data regression, where the Fixed Effect Model (FEM) was selected as the best method after testing with the Chow and Hausman tests. The study findings indicate three main results: first, there is a significant negative relationship between the unemployment rate and white-collar crime; second, a significant positive relationship was found between GRDP per capita and the white-collar crime rate; third, the average length of schooling and the Gini ratio were found to be insignificant with white-collar crime. The findings illustrate that increased economic activity can increase the chances of white-collar crime, while high unemployment actually reduces access to strategic positions that allow for such crimes. The implications of these results emphasize the importance of good supervision and governance in preventing misuse of economic resources along with economic growth.

Keywords: Average Years of Schooling, Unemployment, GRDP, Gini Ratio, White-Collar Crime

ABSTRAK

Studi ini mengkaji pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap kejahatan kerah putih di Indonesia, data diambil dari 34 provinsi selama tahun 2017–2023. Menggunakan data kuantitatif yang diambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif melalui regresi data panel, dimana *Fixed Effect Model* (FEM) dipilih sebagai metode terbaik setelah dilakukan pengujian dengan uji Chow dan Hausman. Temuan studi mengindikasikan tiga hasil utama: pertama, terdapat hubungan negatif yang signifikan antara tingkat pengangguran dengan kejahatan kerah putih; kedua, ditemukan hubungan positif yang signifikan antara PDRB per kapita dengan tingkat kejahatan kerah putih; ketiga rata-rata lama sekolah dan rasio Gini rasio ditemukan tidak signifikan dengan kejahatan kerah putih. Temuan menggambarkan bahwa kenaikan aktivitas ekonomi dapat menaikkan peluang terjadinya kejahatan kerah putih, sedangkan pengangguran yang tinggi justru mengurangi akses terhadap posisi strategis yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut. Implikasi dari hasil ini menekankan pentingnya pengawasan dan tata kelola yang baik dalam mencegah penyalahgunaan sumber daya ekonomi seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Rata-rata Lama Sekolah, Pengangguran, PDRB, Rasio Gini, Kejahatan Kerah Putih

PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merumuskan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang memiliki 17 tujuan. Dan pada poin SDGs ke 16 yang berfokus pada penguatan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan. Salah satu target dalam tujuan ini adalah menekan angka kriminalitas dengan harapan tingkat kasus pidana per 100.000 penduduk dapat berkurang hingga 50% pada tahun 2030 (Alisjahbana 2018). Keberhasilan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang adil dan menjangkau seluruh tingkat sosial (Mardinsyah and Sukartini 2020). Suatu negara dianggap berhasil dalam pembangunannya apabila kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan tingkat pengangguran dapat diselesaikan. Meski demikian, manfaat dari pembangunan ekonomi masih belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Kejahatan merupakan permasalahan yang dihadapi Indonesia karena dapat merugikan banyak pihak. Tindak kriminal bisa dilakukan oleh siapa saja dengan atau tanpa kesadaran, dan hal tersebut kerap dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Kerugian akibat tindak pidana mencakup aspek finansial, fisik, moral, dan psikis (Hachica and Triani 2022). Secara umum, kejahatan diklasifikasikan ke dalam dua kategori yakni kejahatan kerah biru (*blue-collar crime*) dan kejahatan kerah putih (*white-collar crime*), yang perbedaannya terletak pada pelaku serta jenis kejahatan yang dilakukan. *White-collar crime* lebih didefinisikan berdasarkan karakteristik pelakunya daripada bentuk kejahatannya (Zulherawan 2019). Kejahatan kerah putih di Indonesia sudah umum atau sangat banyak terjadi dan sering diberitakan. Jika dilihat dari tahun 2022 sampai 2023 tingkat kenaikan kasus sangat tinggi sebesar 63,61%. Hal ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum karena terus merugikan masyarakat (Eleanora 2013). Berbeda dari kejahatan konvensional, pelakunya biasanya berasal dari kelas menengah atas dengan akses luas ke sumber daya ekonomi dan sosial. Dalam bidang hukum, kejahatan ini menjadi perhatian karena berdampak besar pada perekonomian, masyarakat, dan reputasi bisnis. Tindakannya sering meliputi penipuan, korupsi, manipulasi keuangan, dan penggelapan (Aulia and Harahap 2023). Meskipun banyak dilakukan oleh kalangan menengah atas, kondisi sosial dan ekonomi tetap memainkan peran dalam memengaruhi angka kejahatan ini di wilayah tertentu.

Dalam pandangan Sutherland (1949) kejahatan kerah putih merujuk tindak kriminal yang dilakukan individu atau kelompok yang berpengaruh dalam lingkungan profesionalnya dalam konteks pekerjaan mereka. Faktor pendidikan memiliki peran ganda yaitu di satu sisi dapat meningkatkan kesadaran hukum, namun di sisi lain bisa juga memfasilitasi pemahaman celah hukum untuk disalahgunakan (Becker et al. 1968). Kondisi ekonomi juga berperan signifikan, dimana pengangguran dapat mendorong tindak kriminal sebagai respons atas tekanan ekonomi (Freeman 1999). Ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini ratio menunjukkan korelasi dengan peningkatan kejahatan (Fajnzylber 2013). Sementara itu, PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kesempatan kerja dan tingkat kejahatan di suatu wilayah (Schoepfer 2004). Dengan

demikian, kombinasi faktor sosial-ekonomi seperti pendidikan, status sosial, dan kondisi ekonomi memainkan peran penting dalam terjadinya kejahatan kerah putih.



Gambar 1. Grafik Tingkat Kejahatan

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada grafik 1 di atas terlihat tingkat kejahatan kerah putih di Indonesia mengalami fluktuasi pada tahun 2017-2023. Pada tahun 2017 terdapat sebanyak 47.594 kasus kejahatan kerah putih, lalu terjadi penurunan bertahap hingga mencapai titik terendah pada tahun 2021 dengan 35.093 kasus. Namun, mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022 sebanyak 46.756 kasus dan peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2023 mencapai 76.499 kasus yang mana ini menjadi jumlah kasus terbanyak selama tujuh tahun terakhir. Kejahatan ini terjadi seluruh provinsi di Indonesia, besarnya jumlah kejahatan yang tercatat menunjukkan perlunya respons tegas dari pemerintah dan aparat hukum. Angka tersebut bahkan berpotensi meningkat apabila mempertimbangkan kasus-kasus yang tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan. (Arizal, Wahyudi, and Chandra 2023).

Berdasarkan studi yang dilakukan Steviani et al (2020) ditemukan bahwa faktor pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan usia menunjukkan korelasi positif dengan tingkat kriminalitas. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan ketiga variabel tersebut akan diikuti dengan kenaikan angka kejahatan di wilayah Sumatera Barat. Di sisi lain, tingkat pendidikan dan keberhasilan penanganan kasus oleh pihak kepolisian memperlihatkan hubungan negatif dengan angka kriminalitas. Dengan kata lain, ketika terjadi peningkatan pada aspek pendidikan atau tingkat penyelesaian kasus oleh kepolisian, maka akan terjadi penurunan pada tingkat kejahatan.

Berdasarkan penelitian Sugiharti et al. (2022) menjelaskan pada tingkat agregat menunjukkan bahwa kejahatan terus berlanjut karena memiliki keterkaitan dengan periode sebelumnya. Ketimpangan pendapatan berkontribusi pada peningkatan kriminalitas, sementara pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, investasi, peningkatan pendidikan serta Kesehatan dapat menekan angka kejahatan. Pada tingkat spesifik, hubungan antara kejahatan dan faktor sosial

ekonomi bervariasi. Pertumbuhan pendapatan dapat mengurangi kejahatan dan kekerasan, tetapi meningkatkan pencurian dan penipuan. Pengangguran berhubungan dengan meningkatnya pemerkosaan, kekerasan, perampokan dan penipuan, meski tidak berujung pada pembunuhan. Ketimpangan pendapatan berkontribusi terhadap perampokan dan penipuan, sedangkan investasi infrastruktur menekan kejahatan kekerasan namun dapat meningkatkan perampokan dan penipuan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan and Amri (2023) menyajikan analisis dalam dua dimensi waktu yang berbeda. Dalam jangka panjang, tiga variabel yakni ketimpangan, inflasi, dan pengangguran menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kejahatan, sementara pendapatan per kapita memperlihatkan pengaruh negatif yang signifikan. Sementara itu, analisis jangka pendek mengungkapkan hasil berbeda, dimana hanya ditemukan dua variabel yang berpengaruh signifikan yaitu ketimpangan dengan pengaruh positif dan pendapatan per kapita dengan pengaruh negatif terhadap tingkat kejahatan.

Hubungan antara faktor sosial ekonomi dan tindak kejahatan telah banyak diteliti, namun masih terdapat variasi dalam hasil penelitian. Steviani et al. (2020) dan Sugiharti et al. (2022) menjelaskan pengangguran, tingkat pendidikan, dan kesenjangan memiliki pengaruh positif atas tingkat kejahatan. Ikhsan dan Amri (2023) mengungkapkan ketimpangan dan pengangguran berpengaruh positif dalam periode jangka panjang, sementara dalam periode pendek ketimpangan berpengaruh positif dan pendapatan per kapita berpengaruh negatif. Aulia dan Harahap (2023) menekankan dampak ketimpangan pendapatan terhadap peningkatan kasus korupsi dan penipuan. Mengingat penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada analisis tingkat provinsi secara terpisah, Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, PDRB per kapita, dan rasio gini berpengaruh terhadap kejahatan kerah putih secara nasional dengan menggunakan data 34 provinsi di Indonesia untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam perumusan kebijakan pencegahan kejahatan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data panel yang mencakup 34 provinsi di Indonesia selama periode 2017-2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Penelitian menganalisis lima variabel, terdiri dari satu variabel dependen dan empat variabel independen. Kejahatan kerah putih ditetapkan sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen meliputi tingkat pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah penduduk, tingkat pengangguran yang dinyatakan dalam persentase, PDRB per kapita yang dihitung dari rasio pendapatan terhadap jumlah penduduk, serta ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan melalui koefisien gini.

Analisis dalam penelitian ini menerapkan metode regresi data panel yang dapat diimplementasikan melalui tiga model pendekatan berbeda. Model pertama adalah *Common Effect Model* (CEM), sebuah pendekatan dasar yang mengintegrasikan data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) dalam satu analisis. Model kedua yaitu *Fixed Effect Model* (FEM), yang memungkinkan adanya perbedaan karakteristik antar individu melalui variasi pada nilai *intercept*. Model ketiga adalah *Random Effect Model* (REM), suatu pendekatan yang memperhitungkan kemungkinan adanya keterkaitan variabel gangguan (*error term*) baik antar waktu maupun antar individu dalam proses estimasinya. (Kuciswara, Muslihatinningsih, and Santoso 2021). Dan data diolah menggunakan alat E-Views 12.

Model analisis menggunakan model regresi data panel dengan model ekonometrik sebagai berikut :

$$\text{LogWCC}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{LogRLS}_t + \beta_2 \text{UNMPY}_t + \beta_3 \text{LogPDRB}_t + \beta_4 \text{LogGINIRATE}_t + \varepsilon_t$$

Dimana :

- WCC : Kejahatan Keraf Putih (*white collar crime*) (orang/kasus)
- RLS : Rata-rata lama sekolah (tahun)
- UNMPY : Pengangguran (persen/%)
- PDRB : Produk domestik regional bruto per kapita (ribu rupiah)
- GINIRATE : Ketimpangan pendapatan (0-1)
- ε : *Error term* (faktor kesalahan)
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1 \dots \beta_4$: Koefisien regresi variabel independen
- t : Tahun ke t

Penggunaan data panel memberikan tiga keunggulan utama dalam analisis penelitian. Keunggulan pertama terletak pada kemampuannya memperbesar dimensi sampel yang digunakan. Keunggulan kedua adalah kemampuannya dalam mengamati perubahan yang terjadi secara dinamis, hal ini dimungkinkan karena data panel melakukan pengamatan *cross section* secara berulang. Adapun keunggulan ketiga yaitu data panel menyediakan kemudahan dalam menganalisis model-model perilaku yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi model ekonometrik di atas beserta uji pelengkapanya terangkum dalam tabel 1.

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Data Panel – Cross section

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
<i>C</i>	7.862021	-0.085734	1.407604
LOG(RLS)	0.077887	-0.379687	-0.202089

UNMP	0.158188	-0.075583	-0.061911
LOG(PDRB)	0.136011	0.837577	0.685856
LOG(GINIRATE)	3.496163	0.891386	1.223891
R^2	0.207649	0.929290	0.061993
Adjusted. R^2	0.194046	0,916209	0,045890
Statistik F	15.26537	71.03954	3.849747
Prob. Statistik F	0.000000	0,000000	0,004753
Uji Pemilihan Model			
(1) Chow			
Cross- Section $F(33,200) = 61.852617$; Prob. $F(33,200) = 0,0000$			
(2) Hausman			
Cross-Section random $\chi^2(4) = 11.001046$; Prob. $\chi^2(4) = 0,0266$			

Sumber: BPS, diolah.

Berdasarkan Tabel 1, hasil Uji Chow memperlihatkan bahwa nilai probabilitas dari statistik F empirik adalah 0,0000 yang menunjukkan signifikansi, sebab nilai probabilitas tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat signifikansi α (0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang dipilih. Selanjutnya, hasil Uji Hausman menunjukkan probabilitas statistik χ^2 sebesar 0,0266 yang juga lebih kecil dari α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang paling sesuai dan optimal adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Rincian lengkap dari hasil estimasi model FEM tersebut ditampilkan pada tabel selanjutnya.

Tabel 2. Model Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

$\log(WCC)_{it} = -0.0857 - 0.3796\log(RLS)_{it} - 0.0755UNMP + 0.8375\log(PDRB)_{it} + 0.8913\log(GiniRate)_{it}$
(0,4298) (0,0143) (0,0104) (0,2328)
$R^2 = 0.929290$; $DW = 1.332942$; $F = 71.03954$; Prob. $F = 0,0000$

Sumber: BPS, diolah.

Berdasarkan hasil regresi tabel 2 Uji F menghasilkan bahwa nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan variabel rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, PDRB per kapita, dan rasio gini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya kejahatan kerah putih. Kemudian koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9292 berarti bahwa 92,92% variasi kejahatan kerah putih dapat dijelaskan oleh rata rata lama sekolah, pengangguran ,PDRB perkapita, dan gini rasio. Sedangkan sisanya 7,08% dipengaruhi oleh variabel yang tidak termasuk dalam model.

Hasil uji t diketahui bahwa tingkat pengangguran terbukti berpengaruh negatif Dengan hasil uji t menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0143 lebih kecil dibandingkan batas signifikansi 0,05. terhadap jumlah kejahatan kerah putih. Dan PDRB per kapita terbukti berpengaruh positif dengan nilai probabilitas empiris t 0,0104 < 0,05 terhadap jumlah kejahatan kerah putih. sementara rata-rata lama

sekolah dan gini rasio tidak memiliki pengaruh pada jumlah kejahatan kerah putih dikarenakan probabilitas t-statistiknya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hanya koefisien pengangguran dan PDRB per kapita yang dapat diinterpretasikan, sementara koefisien rata-rata lama sekolah dan gini rasio tidak perlu diinterpretasikan.

Variabel pengangguran memiliki koefisien regresi sebesar -0,0755 yang memiliki pola hubungan dengan kejahatan kerah putih adalah logaritma-linear (log-lin). Sehingga apabila pengangguran naik 1% maka kejahatan kerah putih akan turun sebesar 7,55%, sebaliknya apabila pengangguran turun 1% maka kejahatan kerah putih akan naik sebesar 7,55%. Variabel PDRB per kapita menunjukkan koefisien regresi senilai 0,8375 dengan pola hubungan logaritma-logaritma (log-log) terhadap kejahatan kerah putih. Dengan demikian, jika PDRB per kapita mengalami peningkatan sebesar 1%, maka kejahatan kerah putih akan meningkat sebesar 0,8375%. Sebaliknya, ketika PDRB per kapita mengalami penurunan 1%, maka kejahatan kerah putih juga akan menurun dengan besaran yang sama yaitu 0,8375%.

Pembahasan

Berdasarkan hasil regresi, diketahui pengangguran menunjukkan hubungan negatif dan PDRB menunjukkan hubungan positif dengan jumlah kejahatan kerah putih. Sedangkan rata-rata lama sekolah dan rasio gini tidak menunjukkan hubungan yang signifikan.

Hubungan antara pengangguran dan kejahatan kerah putih memiliki pola yang berbeda dari kejahatan konvensional. Peningkatan pengangguran biasanya mendorong kenaikan kejahatan konvensional karena tekanan ekonomi mendorong tindakan ilegal untuk memenuhi kebutuhan. Namun, pada kejahatan kerah putih, pengangguran justru berpengaruh negatif karena dua faktor. Pertama, tingginya pengangguran mengurangi akses terhadap sumber daya ekonomi dan institusional, sehingga lebih sedikit orang yang memiliki posisi di lingkungan bisnis atau profesional; kedua, penurunan aktivitas ekonomi menyebabkan pemerintah dan lembaga keuangan memperketat pengawasan terhadap transaksi keuangan dan keputusan bisnis, yang mengakibatkan semakin terbatasnya peluang untuk melakukan kejahatan kerah putih. Hasil serupa juga ditemukan dalam studi Azahra and Sinaga (2023) yang menunjukkan bahwa seseorang melakukan kejahatan kerah putih didasari motif kesempatan, yang mana mereka memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Rahmalia, Ariusni, and Triani (2019) yang menunjukkan pengangguran memiliki pengaruh negatif signifikan yang artinya meningkatnya pengangguran dapat menurunkan kriminalitas begitu pun sebaliknya menurunnya tingkat pengangguran dapat meningkatkan kriminalitas.

PDRB Per kapita memiliki hubungan positif dengan jumlah kejahatan kerah putih. Artinya peningkatan aktivitas ekonomi di suatu wilayah yang dicerminkan dari naiknya PDRB dan tidak diikuti dengan penegakan hukum yang tegas justru

berkorelasi dengan meningkatnya potensi kejahatan kerah putih. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, meskipun membawa manfaat tetapi juga dapat menjadi peluang bagi individu atau kelompok untuk melakukan tindakan kejahatan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan Sitorus, Rahmadani, and Sahlan (2023) yang menyatakan bahwa kejahatan kerah putih sering terjadi di negara dengan kondisi ekonomi dan kebijakan yang memberikan peluang bagi pelaku untuk melestarikan eksistensi kejahatan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang kuat dapat memicu peningkatan kejahatan kerah putih. Ketika pendapatan meningkat masyarakat akan meningkatkan ambisi untuk mencapai gaya hidup juga lebih tinggi. Hasil penelitian yang sama oleh Rahadiantino et al. (2024) menjelaskan ambisi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dapat memicu terjadinya kecurangan, kemungkinan terjadinya kecurangan akibat dari pengawasan yang kurang ketat dan penyalahgunaan wewenang .

KESIMPULAN

Tindak kriminal kerah putih merupakan jenis kriminalitas yang biasanya melibatkan seseorang atau sekelompok dengan status sosial menengah atas. Motivasi kejahatan ini seperti keuntungan finansial, kesempatan, dan persepsi rendahnya risiko, memberikan wawasan tentang faktor pendorong kejahatan ini.

Berdasarkan hasil analisis menghasilkan bahwa variabel sosial ekonomi memiliki hubungan dengan tingkat tindak kriminal kerah putih. Faktor jumlah pengangguran menunjukkan hubungan negatif, mengindikasikan bahwa peningkatan pengangguran justru menurunkan jumlah tindak kriminal kerah putih. Dengan demikian, dapat dijelaskan karena tindak kriminal ini membutuhkan akses ke posisi profesional dan akses terhadap sumber daya, dimana kesempatan ini akan berkurang saat tingkat pengangguran tinggi. Di sisi lain, PDRB per kapita menunjukkan pengaruh positif yang mengisyaratkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan justru membuka peluang untuk melakukan tindak kejahatan ekonomi karena tersedianya lebih banyak sumber daya dan kesempatan. Hasil ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi agar dapat mengatasi masalah tindak kriminal kerah putih lebih efektif, dengan mempertimbangkan dan melihat bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan dan tata kelola yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya ekonomi.

DAFTAR PUSAKA

- Alisjahbana, A. S. (2018). *Menyongsong SDGs: Kesiapan daerah-daerah di Indonesia*. Unpad Press.
- Arizal, H., Wahyudi, W. W., & Chandra, H. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011–

- 2018 (Pendekatan hukum & ekonomi). *Jurnal Pembangunan Nagari*, 8(1), 55.
<https://doi.org/10.30559/jpn.v8i2.417>
- Aulia, C., & Harahap, H. S. (2023). Penyebab tindak pidana white collar crime. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa*, 3(1), 1–10.
<https://doi.org/10.58192/insdun.v3i1.1648>
- Azahra, H., & Sinaga, U. H. (2023). Aspek kriminologi white collar crime. *Khidmat*, 1(2), 130–135.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- Eleanora, F. N. (2013). White collar crime hukum dan masyarakat. *Forum Ilmiah*, 10, 242.
- Fajnzylber, P., Lederman, D., & Loayza, N. (2013). Inequality and violent crime. *The Journal of Law and Economics*. <https://doi.org/10.1086/338347>
- Freeman, R. B. (1999). The economics of crime. *Handbook of Labor Economics*, 3, 3529–3571.
- Hachica, E., & Triani, M. (2022). Pengaruh pendidikan, pengangguran dan kepadatan penduduk terhadap kriminalitas di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 11(1), 63.
<https://doi.org/10.24036/ecosains.11814857.00>
- Ikhsan, I., & Amri, A. (2023). Exploration of macroeconomic effects on criminality in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206678>
- Kuciswara, D., Muslihatinningsih, F., & Santoso, E. (2021). Pengaruh urbanisasi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, 6(3), 1–9.
<https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16307>
- Mardinsyah, A. A., & Sukartini, N. M. (2020). Ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan akses informasi: Bagaimana pengaruhnya terhadap kriminalitas di Indonesia? *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5, 1–10.
- Rahadiantino, L., Nilasari, A., Rakhmawati, D. Y., & Fatoni, F. (2024). How population density and welfare affect crime rates: A study in East Java Province, Indonesia. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(8), 1–16.
- Rahmalia, S., Ariusni, & Triani, M. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(1), 21–36.
- Schoepfer, A. (2004). Exploring white-collar crime and the American Dream. *Journal of Contemporary Criminal Justice*.

- Sitorus, A. S., Rahmadani, N., & Sahlan, S. (2023). Dampak white collar crime bagi pemerintah dan masyarakat. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora*, 2(3), 226–233.
- Steviani, E., Handra, H., & Maryati, S. (2020). Faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi tindak kejahatan di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(1), 42–51.
- Sugiharti, L., Esquivias, M. A., Shaari, M. S., Agustin, L., & Rohmawati, H. (2022). Criminality and income inequality in Indonesia. *Social Sciences*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/socsci11030142>
- Sutherland, E. H. (1949). Analysis of Edwin Sutherland's definition of white collar crime and leveled criticism. *American Sociological Review*, 1, 1–17.
- Zulherawan, M. (2019). Tindak kejahatan korupsi white collar crime: Model, tren, dan penyebabnya. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 55, 55–69.